



Judul : Selidiki Proyek Roboh : DPR Bentuk Panja
Tanggal : Senin, 26 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Selidiki Proyek Roboh DPR Bentuk Panja

ANGGOTA Komisi V DPR Nizar Zahro menilai, langkah pemerintah melakukan moratorium dalam menyikapi rentetan kecelakaan proyek sangat kontraproduktif. Disatu sisi, Presiden Jokowi meminta percepatan pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain, moratorium dilakukan. DPR akan bentuk Panitia Kerja (Panja) menyelidikinya.

Menurutnya, evaluasi terhadap Inpres itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden terhadap berbagai kecelakaan kerja akibat kegagalan konstruksi karena dilakukan secara tergesa-gesa. "Harus dievaluasi atau bahkan dicabut juga Inpresnya supaya tidak kontraproduktif. Kemarin bilang dihentikan sementara, di sisi lain ada Inpres isinya percepatan PSN," tegasnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Menurut dia, Inpres tersebut diterbitkan oleh Presiden Jokowi dalam rangka percepatan pelaksanaan PSN untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum. Perintah itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung, Kapolri, Sekretaris Kabinet,

para kepala lembaga pemerintahan non kementerian hingga pemerintah daerah.

"Payung hukumnya ada disitu, cabut dulu dong itu. Karena itu menjadi pemicu terjadinya berbagai kecelakaan kerja," ujarnya.

DPR juga akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait keselamatan kerja proyek infrastruktur. Karena, proyek infrastruktur yang digarap pemerintah terkesan dipaksakan. "Hentikanlah ambisi yang kalap itu. Tenaga para pekerja dipacu untuk memenuhi ambisi presiden. Proyek dikebut siang dan malam untuk mengejar acara peresmian," cetusnya.

Nizar melihat porsi kerja yang di luar kemampuan manusia menjadikan proyek terkesan dikerjakan asal-asalan. Maka tidak heran jika mulai bermunculan kecelakaan. Sayangnya, sudah berkali-kali jatuh korban namun tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman mengatakan, DPR telah meminta dilakukan pengawasan secara ketat terhadap proyek yang dikerjakan BUMN "Kami sudah minta evaluasi dan pengawasan proyek-proyek konstruksi infrastruktur yang dikerjakan BUMN," katanya. ■ KPJ